

**STUDI TENTANG PENGELOLAAN GELORA KADRIE
OENING OLEH UPTD PENGELOLAAN PRASARANA
OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Vanessa Gladys Priscillia, Heryono Susilo Utomo, Thalita Rifda Khaerani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 3, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Studi Tentang Pengelolaan Gelora Kadrie Oening Oleh UPTD
Pengelolaan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur

Pengarang : Vanessa Gladys Priscillia

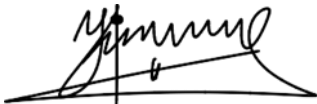
NIM : 1602015028

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi
Administrasi Publik Fisip Unmul.

Pembimbing I,



Dr. Heryono Susilo Utomo, M.Si.
NIP 19591023 198803 1 010

Samarinda, 14 Juni 2023

Pembimbing II,



Thalita Rifda Khaerani, S.A.P., M.Si.
NIP 19890922 202203 2 012

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Ariani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 11	
Nomor	: 3	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 537-549	

STUDI TENTANG PENGELOLAAN GELORA KADRIE OENING OLEH UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Vanessa Gladys Priscillia ¹, Heryono Susilo Utomo ², Thalita Rifda Khaerani ³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan pengelolaan Gelora Kadrie Oening yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga (PPO) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pengelolaannya. Jenis penelitian yang dilakukan ini deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (Actuating), dan pengawasan (controlling) serta faktor penghambat. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kepala UPTD PPO dan Informan adalah Seksi Stadion Gelora Kadrie Oening, staf-staf Gelora Kadrie Oening, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah purposive sampling yaitu penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD PPO Dispora Kaltim tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan banyaknya kondisi fasilitas di Gelora Kadrie Oening yang memerlukan perbaikan serta pemeliharaan yang rutin. Yang artinya dilihat dari sisi perencanaan yang dibuat setiap tahunnya perlu memfokuskan pengelolaan yang maksimal, Pengorganisasian yang ada sudah berjalan cukup baik, Penggerakan yang ada dalam pengelolaan Gelora Kadrie Oening masih perlu ditingkatkan, tetapi sebagian belum bisa merepresentasikan seluruh rencana yang ditetapkan, dari sisi pengawasan terbagi menjadi dua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal berjalan sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar tujuan tercapai, faktor penghambat yang ada dilihat dari sisi pendanaan yang kurang, tidak ada kebijakan baru soal parkir untuk penarikan retribusi, kurangnya revitalisasi di prasarana yang ada, SDM di bidang kebersihan kurang responsif, dan kurangnya sosialisasi digitalisasi oleh UPTD PPO Gelora Kadrie Oening.

Kata Kunci : *Pengelolaan Gelora, Prasarana Olahraga, Retribusi Gelora Kadrie Oening*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: vanessagladys7@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Kota Samarinda memiliki Gelanggang Olahraga (Gelora) yang mempunyai fungsi ruang berolahraga, sebagai paru-paru kota dan ruang terbuka bagi masyarakat berkumpul. Sebagai sarana fasilitas publik maka diharapkan Gelora dapat di kelola secara baik dan mendapatkan perawatan terbaik, sehingga dapat dapat difungsikan secara maksimal dan tentu akan membuat masyarakat sebagai pengguna merasa nyaman dengan fasilitas pelayanan publik tersebut.

Diketahui, bahwa gelora atau stadion-stadion yang berdiri di Kota Samarinda di dalam pengelolaanya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu di Kelola Pemerintah Kota Samarinda dan yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Pemerintah Kota Samarinda mengelola Gelora Stadion Segiri yang berada di Jalan Kesuma Bangsa, sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengelola Gelora Kadrie Oening (atau yang dulu Bernama Kompleks Stadion Madya Sempaja) yang berada di Jalan Wahid Hasyim 1 dan Stadion Utama Palaran di Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda.

Segala aset yang sudah dibangun pemerintah memerlukan perawatan yang prima agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang nyaman dengan kondisi yang terawat. Dalam pengelolaan gelanggang olahraga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Unit Pembantu Tugas Dinas (UPTD) yang bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis di bidang pengelolaan prasarana olahraga dan melakukan urusan ketatausahaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga (UPTD PPO) pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur.

Terbentuknya UPTD PPO Dispora Kaltim diharapkan dapat mengelola dan merawat aset pemerintah yaitu, Gelora Kadrie Oening dan Stadion Utama Palaran. Selain itu keberadaan UPTD PPO Dispora Kaltim diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Bersumber pada uraian dan latar belakang yang dikemukakan diatas, kemudian disusunlah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Gelanggang Olahraga (Gelora) Kadrie Oening ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Olahraga (UPTD PPO) Dispora Provinsi Kalimantan Timur

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan

Pengelolaan bersumber dari kata kelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengelolaan adalah cara, proses,perbuatan mengelola.

Arti lainnya dari pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. (Kemendikbud: 2016)

Kata *management* itu berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, lalu diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan "pengelolaan", yakni sebagai suatu proses, menganalisa, menetapkan tujuan, serta mendeterminasi tugas-tugas (kewajiban) agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. (Wijaya & Rifa'i, 2016:14)

Pengertian pengelolaan dibagi menjadi tiga, yaitu: pertama, pengelolaan sebagai proses, kedua, pengelolaan sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen, ketiga pengelolaan sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu. (Manulang, 2012 :15-17)

Dari beberapa definisi pengelolaan yang diterangkan oleh para pakar tadi di atas dapat disimpulkan bahwa "pengelolaan" adalah suatu proses yang dilakukan, disusun, dan berguna dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam melakukan tindakan yang akan dipakai dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam Upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ratminto, 2014 : 5-6)

Pelayanan publik atau pelayanan umum sangat berkaitan dengan upaya penyediaan barang publik atau jasa publik, dapat dipahami dengan menggunakan taksonomi barang dan jasa antara lain menurut derajat eksklusivitasnya (apakah suatu jasa/ barang hanya dapat dinikmati secara eksklusif oleh satu orang) dan derajat keterhabisannya (apakah satuan jasa atau barang habis dikonsumsi atau tidak setelah terjadinya transaksi ekonomi yang dikemukakan Hawlett dan Ramesh (dalam Syafiie, 2017:15)

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian proses memenuhi kebutuhan pelayanan hak dasar bagi setiap warga negara dan penduduk berupa barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana dan Prasarana Olahraga

Menurut Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Usaha, sarana olahraga adalah sarana yang dipergunakan untuk kegiatan berolahraga dan kegiatan yang lainnya yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur.

Sarana dan prasarana olahraga digunakan untuk menunjang aktivitas olahraga, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sarana adalah segala hal yang dipakai sebagai penunjang/ alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan istilah sarana olahraga menurut Soepartono adalah terjemahan dari Bahasa Inggris dari kata "*facilitie*" yaitu sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam proses pembelajaran jasmani. (Pricahyono, 2015:18)

Dapat disimpulkan sarana dan prasarana olahraga yang dikelola dan diawasi dengan baik dapat menunjang serta memfasilitasi para pelaku olahraga seperti setiap orang dan kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan. Para pelaku olahraga seperti olahragawan yang merupakan pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. Selain para pelaku olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang difasilitasi dan dikelola dengan baik dapat dijadikan tempat untuk olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi. (Pricahyono, 2015:21)

Definisi Konsepsional

Pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga adalah upaya struktural dalam bentuk kegiatan pengelolaan dan kegiatan teknis operasional dalam rangka menyediakan dan menjaga prasarana olahraga yang optimal untuk masyarakat .

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini antara lain adalah:

1. Pengelolaan Gelora Kadrie Oening Oleh UPTD Pengelolaan Gelora Kadrie Oening Oleh UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*).
2. Faktor penghambat dalam Pengelolaan Gelora Kadrie Oening Oleh UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu: data primer dan data sekunder. Key informan sebagai sumber data primer adalah Kepala UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim, dan informan ialah Seksi Stadion Madya Gelora Kadrie Oening, Staf-staf Gelora Kadrie Oening dan masyarakat. Sedangkan data

sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) tinjauan pustaka (*library research*), (2) penelitian lapangan (*fieldwork research*), yaitu melalui observasi, wawancara dan peneltian dokumen. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) yang terdiri dari kegiatan : (1) pengumpulan data (*data collection*), (2) kondensasi data (*data condensation*), (3) penyajian data (*data display*), (4) penyimpulan/ verifikasi (*drawing and verifying conclusions*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengelolaan Gelora Kadrie Oening Oleh UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim

a. Perencanaan (Planning) dalam Pengelolaan Gelora Kadrie Oening

Berdasarkan pada hasil penelitian perencanaan yang dilakukan oleh UPTD PPO Dispora Kaltim melalui wawancara meliputi kegiatan penjabaran visi misi, program kerja dan kebijakan – kebijakan strategis, ini dimaksudkan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan aset, pelayanan masyarakat, termasuk dalam rangka pemeliharaan seluruh fasilitas yang ada.

UPTD PPO Dispora Kaltim dalam satu tahu memiliki rencana strategis yang secara umum memuat tentang apa yang akan dikerjakan dan yang tidak dikerjakan sebagai kebijakan publik. Dalam pengelolaan Gelora Kadrie Oening , beberapa yang menjadi fokus dalam pelaksanaan meliputi pengelolaan dan pemeliharaan aset, kerjasama bersama pihak ketiga, peningkatan pendapatan retribusi dan pelayanan masyarakat. Dalam kaitannya dengan retribusi ada target pendapatan yang dibebankan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dari beberapa program dalam pengelolaan gelora kadrie onieing yang direncanakan seperti di tahun 2022 semuanya hampir berhasil dilakukan namun ada juga program yang belum memenuhi target, diarahkan ke tahun 2023 dengan anggaran yang baru. Juga beberapa pendapatan retribusi yang rendah akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan seluruh akses pelayanan kepada mayarakat ditutup untuk publik di tahun 2019 akhir – di tahun 2022 pertengahan yang menyebabkan pendapatan retribusi menurun.

Dengan demikian perencanaan pada pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga sudah berjalan dengan baik, namun proses pada pengembangan pengelolaannya harus tersusun rencana lanjutan yang nantinya menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan adanya prasarana olahraga di Provinsi Kalimantan Timur yang

memadai, apalagi nantinya Ibu Kota Nusantara (IKN) akan berada di Kaltim tentunya harus dipersiapkan perencanaan yang sesuai dengan teori Terry (2009) didalam perencanaan perlu adanya penghubungan fakta-fakta dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

b. Pengorganisasian (Organizing) dalam Pengelolaan Gelora Kadrie Oening

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim dalam melakukan pengelolaan memiliki personel sebanyak 143 orang yang terbagi menjadi 17 PNS dan 126 non-PNS. Masing-masing pegawai yang ada memiliki jenjang pendidikan dan jabatan yang berbeda-beda yang mempunyai tugas dalam mengelola Gelora Kadrie Oening dan Stadion Utama Palaran. Untuk Stadion Gelora Kadrie Oening berjumlah 89 pegawai terbagi 14 PNS dan 75 pegawai non PNS. Ukuran pegawai yang bekerja di Gelora Kadrie Oening memang terbilang banyak karena kegiatan kantor pusat berada di Gelora Kadrie Oening juga Gelora Kadrie Oening memiliki aktivitas yang lebih aktif kegiatannya dibandingkan Stadion Utama Palaran.

Pengelolaan Gelora Kadrie Oening menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan prasaranan (*Venue*) yang ada. Setiap fasilitas/ prasarna secara teknis di tangani penanggung jawab kegiatan di lapangan dan koordinator *venue*, dimana merekalah yang akan berhubungan langsung pada pihak penyewa atau pihak yang berkepentingan dalam penggunaan venue yang tersedia.

Dalam pengelolaan Gelora Kadrie Oening, pihak UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan fasilitas dan *event*, beberapa yang disampaikan dalam penelitian, yaitu: pengelolaan parkir dikerjasamakan kepada Primkop Korem AMP (2013-2019), wisata belanja (wisbel) yang diadakan setiap minggu bekerjasama dengan Bankaltimara, selain itu pula kerjasama dengan PT. Telkomsel Indonesia, dimana pihak Telkomsel menyewa lahan untuk membangun tower jaringan yang ada pada Gelora Kadrie Oening, dan kerjasama pihak ketiga/ swasta terhadap tenaga kebersihan khusus GOR Serbaguna.

Untuk keamanan Gelora Kadrie Oening, UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim bekerjasama dengan pihak Babinsa setempat dan Babinkamtibnas, serta adanya tim pengaman yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di GeloraKadrie Oening.

Namun dengan adanya sumber daya manusia yang bekerja di Gelora Kadrie Oening dan juga anggaran yang digunakan dalam pengelolaan, masih mendapat kritikan dari masyarakat terutama di hari minggu lingkungan parkir tidak terususun rapi, retribusi parkir yang diberikan pada hari minggu tidak menjadi pemasukan bagi UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim dikarenakan

belum dijalanannya kebijakan perparkiran yang baru, dan juga kebersihan seperti toilet umum yang kurang baik, hingga saat penggunaan venue yang ada mendapat keluhan seperti pendingin yang tidak berfungsi dengan baik.

Dapat dipahami bahwa sumberdaya dalam pengorganisasian merupakan salah satu indikator yang memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan tujuan bersama. Karena dengan adanya sumber daya ada, perencanaan yang sudah terusun secara jelas dan mempunyai target yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Seperti pihak UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim tidak menarik retribusi karena tidak adanya kebijakan yang terbaru sehingga membuat terhambat penetapan target yang telah diberikan oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) setiap tahunnya yang artinya kurangnya dukungan pemerintah melihat hal ini sebagai suatu peluang untuk meningkatkan retribusi yang nantinya dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga ada dalam fungsi UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim.

c. Penggerakan (Actuating) dalam Pengelolaan Gelora Kadrie Oening

Pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim adalah sekumpulan tata laksana yang telah ditetapkan dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, merawat fasilitas Gelora Kadrie Oening dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) lewat penyewaan *venue-venue* yang ada. Yang dibentuk dalam perencanaan yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya, kemudian akan direalisasikan dalam bentuk kegiatan laporan.

Pendanaan UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim bersumber dari APBD Provinsi Kaltim secara berkala tiap tahun, anggaran yang dikelola di gunakan untuk pengelolaan dua tempat yaitu Gelora Kadrie Oening dan GOR Utama Palaran. Biasanya nominal anggaran juga melihat dari faktor banyaknya kegiatan yang dilakukan atau ada event besar di Gelora Kadrie Oening yang akan dilaksanakan.

Fasilitas yang ada di Gelora Kadrie Oening dalam aturan sewanya ditetapkan menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibagi menjadi 3 dalam penyewaannya berdasarkan besaran tarif dari harga tertinggi dan terendah yaitu Komersial, Sosial/ keagamaan, dan keolahragaan.

Fasilitas yang disewakan UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim untuk Gelora Kadrie Oening berjumlah 19, terdiri dari Gedung Serba Guna, GOPR Latihan 1, GOR Latihan 2, Gedung Asrama Atlet 1 dan Gedung Asrama Atlet 2, Lapangan Parkir Utara dan Lapangan Parkir Selatan, Gedung Stadion

Lapangan Bola/ Tribun, Lapangan Bola Indoor, Lapangan Bola Outdoor, Lapangan Atletik Stadion, Lapangan Tenis Outdoor, Lapangan Volley Indoor, Lapangan Volley Outdoor, Lapangan Bulu Tangkis Indoor, Lapangan Basket Indoor, Lapangan Basket Outdoor, Lapangan Hockey, Sewa Tanah, dan Sewa Tanah Bangunan yang ada di Gelora Kadrie Oening.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menurut UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim, anggaran pengelolaan yang diberikan masih belum mencukupi untuk membenahi semua fasilitas yang ada. Dimana ada 2 objek yang dilakukan pengelolaan yaitu Gelora Kadrie Oening yang berada di JL. Wahid Hasyim 1 dan Stadion Utama Palaran berada di Palaran. Sehingga masoh ada *venue-venue* yang mendapat kritikan masyarakat Ketika digunakan atau disewakan kepada masyarakat.

Juga dengan adanya tugas untuk mencapai retribusi yang ditargetkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim setiap tahunnya belum bisa menopang dari kebutuhan kegiatan operasional. Dimana biaya pengelolaan lebih besar daripada biaya penarikan retribusi yang didapat sehingga bisa dikatakan tidak ada keuntungan signifikan.

Dengan demikian penggerakan pada pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD PPO Dispora Kaltim sudah terlaksana dengan cukup baik namun masih perlu penyuluhan terkait pengelolaan pada bidang penggerakan organisasi UPTD PPO yang dapat diartikan apabila penggerakan telah berjalan sesuai dengan pembagian kerja maka seluruh rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai juga pengelolaan yang ada di Gelora Kadrie Oening akan semakin terlihat hasil kerjanya bukan hanya pekerjaan yang statis dengan paksaaan dan tidak ada pengembangan dalam pekerjaan yang dilakukan, ini sesuai dengan teori Terry (2009) penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha- usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan

d. Pengawasan (Controlling) dalam Pengelolaan Gelora Kadrie Oening

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengawasan dalam pengelolaan Gelora Kadrie Oening yang dilakukan oleh UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim terbagi menjadi dua, yaitu: pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala UPTD PPO dalam memonitoring kinerja dari pegawai yang bekerja, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan Eksternal dalam pengelolaan Gelora Kadrie Oening juga dilakukan oleh Bapenda Provinsi Kaltim, Pemerintah Provinsi Kaltim, DPRD Provinsi Kaltim, dan masyarakat pengguna Gelora Kadrie Oening.

Garis struktur koordinasi dan menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga pada Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur salah satu fungsi dari UPTD PPO adalah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur yang berarti Kepala Dispora melakukan pengawasan internal terhadap kinerja keseluruhan pegawai di UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim.

Berdasarkan penelitian terhadap pengawasan atas realisasi anggaran pada tahun 2020 pagu sebesar Rp 10.619.093.580, realisasi sebesar Rp 10.028.849.281, sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan Rp 590.244.299. Pada tahun 2021 pagu sebesar Rp 11.509.463.000, realisasi Rp 9.481.990.466, anggaran yang tidak dapat direalisasikan Rp 2.027.472.534, di tahun ini alasan tak terealisasi sejumlah program dikarenakan pandemi covid-19.

Juga, di tahun 2022 dalam Rencana Anggaran Kerja (RAK) dalam pengelolaan yang dilakukan UPTD PPO yaitu target realisasi perencanaan sebesar Rp 26.021.849.631, akan tetapi hingga tahun anggaran berakhir realisasi yang dapat di capai sebesar Rp 24.151.628.702 dan anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 1.870.220.929, dengan adanya selisih ini maka dapat ditarik kesimpulan beberapa program kerja ada yang tidak terealisasi.

Dilihat dari fakta dilapangan dari aspek pengawasan yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal berjalan sudah cukup baik, sesuai dengan fungsi pengawasan namun masih ada pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan agar seluruh program yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat terealisasi.

Dengan demikian pengawasan pada pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD PPO Dispora Kaltim tidak berjalan sebagaimana mestinya yang artinya tidak sesuai berdasarkan Teori Tery (2009) tentang pengawasan yang dapat dirumuskan sebagai proses penetapan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran). Dimana dari hasil penelitian menggambarkan ada selisih anggaran yang cukup jauh sebesar 1,8 Milyar di tahun 2022 dapat diartikan rencana yang telah dibuat ada beberapa yang tidak dapat dicapai di tahun 2022 tersebut hingga perlunya ada pengawasan agar seluruh program, kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim

Faktor penghambat dalam Pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD PPO Dispora Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan pengumpulan data dari hasil penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu:

1. Anggaran (Pendanaan) yang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan observasi yang dilakukan, kurangnya anggaran yang dibutuhkan dengan yang tersedia membuat sebagian perawatan dan pemeliharaan Gelora Kadrie Oening tidak maksimal ditambah dengan anggaran harus dibagi adil yang diperuntukkan untuk dua objek yaitu GOR Utama Palaran dan Gelora Kadrie Oening.

2. Tidak ada kebijakan terbaru yang mengatur perpajakan di Gelora Kadrie Oening.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan observasi yang dilakukan, kebijakan perpajakan merupakan suatu hal yang penting karena retribusi berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu dari dibangunnya UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim ini untuk membantu dalam pengelolaan aset fasilitas pelayanan publik yang nantinya akan berefek kepada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu di setorkan ke Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD). Adanya kendaraan yang keluar masuk dari Gelora Kadrie Oening tidak dapat di mintai untuk retribusi karena tidak adanya kebijakan terbaru sebagai sarana perintah penarikan retribusi, hal ini juga berakibat dihari libur ketika ada kegiatan justru juru parkir liar yang menarik retribusi.

3. Kurangnya Revitalisasi di Sarana dan Prasana yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan observasi yang dilakukan, dengan umur Gelora Kadrie Oening yang sudah mencapai 15 tahun, perlu revitalisasi di prasarana atau *venue-venue* yang tersedia agar membuat pihak ketiga berminat menggunakan prasarana yang ada. Dan juga penambahan di sarana perlu dimasukkan daftar barang yang dibutuhkan untuk Gelora Kadrie Oening sebagai tambahan nilai yang nantinya jika banyak peminat dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuat fasilitas pelayanan publik yang nyaman.

4. Kurangnya tenaga kebersihan yang selalu responsif terhadap lingkungan Gelora Kadrie Oening

Salah satu pengunjung mengeluhkan soal kebersihan yang ada di Gelora Kadrie Oening, salah satunya di toilet yang merupakan fasilitas pelayanan publik. Toilet yang ada di Gelora Kadrie Oening kebanyakan berada di dalam gedung dan kantor, jadi saat pengunjung membutuhkan biasanya gedung atau kantor terserbut dikunci, bukan merupakan fasilitas umum pelayanan publik yang tersedia untuk pengunjung. Juga ketika cuaca hujan lantai tergenang berhari-hari yang artinya tidak ada tenaga kebersihan yang respon mengenai kebersihan yang ada di Gelora Kadrie Oening.

5. Kurangnya sosialisasi digitalisasi oleh UPTD Gelora Kadrie Oening.

Di era digitalisasi ini banyak masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang cepat dan respon yang tanggap, namun di lihat dari realita yang ada UPTD Gelora Kadrie Oening belum menerapkan perkembangan teknologi

yang mumpuni untuk masyarakat sekitar bahkan luar untuk mengetahui segala perkembangan kegiatan yang ada sehingga investor yang banyak kurang tau tentang informasi kegiatan atau *event* yang terselenggara di Gelora Kadrie Oening.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang Pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD PPO Dispora Kaltim dapat diambil kesimpulan:

1. Pengelolaan Gelora Kadrie Oening Oleh UPTD PPO Dispora Kaltim, Secara umum tidak terlaksana dengan baik sehingga perlu untuk lebih ditingkatkan. Secara keseluruhan dapat dinilai dari beberapa poin dibawah ini yaitu:
 - a. Dari segi perencanaan Pihak UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim tidak melakukan survei yang mendalam tentang apa saja pengelolaan fasilitas-fasilitas yang harus diprioritaskan, yang kemudian menyebabkan pengelolaan Gelora Kadrie Oening tidak terlihat hasil yang signifikan dalam perawatannya hingga mendapat kritikan masyarakat.
 - b. Dari segi pengorganisasian di Gelora Kadrie Oening dengan jumlah pegawai yang sangat banyak seharusnya dapat merepresentasikan pekerjaan yang lebih mudah dikerjakan, namun itu tidak tergambar di UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim hingga pengelolaan sebagian anggaran terkuras untuk membayar gaji pegawai.
 - c. Dari segi penggerakan Gelora Kadrie Oening sudah ada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan sebagai pedoman kerja ataupun SOP yang diberlakukan kepada pegawai, namun pengelolaan di sisi kebersihan dan kerapihan belum maksimal karena belum sigapnya petugas dalam memastikan kebersihan di lingkungan dan fasilitas gelora, kondisi aset ada yang rusak berat dan rusak ringan ini pula yang menurunkan minat penyewa.
 - d. Dari pengawasan fungsi pengawasan yang saat ini ada untuk memantau bagaimana perkembangan pengelolaan Gelora Kadrie Oening cukup berjalan baik dari sisi pengawan internal dan pengawasan eksternal. Namun perlunya rencana program-program yang disusun setiap tahunnya oleh UPTD PPO Dispora Kaltim melalui RKA dapat dilaksanakan optimal agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak seerti di tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai.
2. Faktor penghambat pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga adalah faktor penghambat yang ada dilihat dari sisi pendanaan yang kurang sehingga UPTD PPO Dispora Provinsi Kaltim tidak dapat memaksimalkan kinerjanya, tidak ada kebijakan baru soal parkir untuk penarikan retribusi sehingga tidak bisa mencapai target yang diberikan oleh

Bapenda, kurangnya revitalisasi di prasarana yang ada menyebabkan turunnya minat sewa, SDM di bidang kebersihan kurang responsif membuat Gelora Kadrie Oening kumuh di saat masyarakat melakukan kegiatan dan kurangnya sosialisasi digitalisasi oleh UPTD PPO Gelora Kadrie Oening hingga menyebabkan masyarakat tidak tahu soal informasi yang terbaru.

Saran

Berdasarkan penelitian studi tentang pengelolaan Gelora Kadrie Oening oleh UPTD PPO Dispora Kaltim berdasarkan pembahasan yang telah disimpulkan, penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan APBD yang diberikan masih dirasakan kurang oleh Pihak UPTD PPO dalam mengelola Gelora Kadrie Oening, untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya membangun kerjasama dengan pihak ketiga, contohnya menjadikan pengunjung atau pengguna venue sebagai mitra, nantinya dapat dihimpun sebagai member atau sebuah kelompok swadya oleh mereka yang akan dibentuk kegiatan seperti diskusi, kegiatan sastra, event musik yang mengikuti *trends* sehingga menghasilkan pendapatan (keuntungan).
2. Adanya hambatan regulasi terkait regulasi pengelolaan parkir secara mandiri membuat UPTD PPO Dispora Kaltim tidak dapat melakukan penarikan retribusi. Sehingga hal ini harus segera di usulkan melalui Dispora Kaltim selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membawahi UPTD PPO Dispora Kaltim, dari hasil penelitian karena lahan parkir ini merupakan salah satu sumbangsih besar di UPTDPPO Dispora Kaltim dari tahun 2013 – tahun 2019.
3. Kurangnya peremajaan fasilitas mengakibatkan kondisi infrastruktur rusak ringan hingga rusak berat, sebaiknya agar bisa di perbaiki untuk dapat menentukan prioritas anggaran untuk perbaikan atau penambahan secara bertahap melalui sistem penganggaran multiyear. Mengingat jika rusak ringan masih bisa di tindaklanjuti melalui sistem swadaya atau belanja bahan yang umumnya ada di anggarann rutin, tapi jika rusak berat sudah menjadi wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum.
4. Pengelolaan Gelora Kadrie Oening dilapangan soal kebersihan banyak dikeluhkan masyarakat, padahal jika dilihat dari jumlah pegawai sudah mencukupi. Sebaiknya pengelolaan untuk tenaga kebersihan diberikan *job description* kepada tenaga kebersihan yang harus selalu sigap seperti adanya koordinator yang mengecek, siapa saja yang bertugas, adanya jadwal kebersihan, apa saja yang harus dikerjakan dalam mengingat wilayah Gelora Kadrie Oening yang cukup luas.
5. Ketidaktahuan soal informasi penyewaan hingga informasi soal kondisi *venue-venue* yang ada akan berimbas pada penurunan minat pengguna Gelora Kadrie Oening, sebaiknya di zaman era digitalisasi ini UPTD PPO mampu memunculkan inovasi yang menjadi informasi lewat kegiatan publikasi dan promosi yang tanpa batas melalui online seperti facebook, twitter, isntagram,

whatsapp, dan website agar sampai kepada pihak yang tepat.

Daftar Pustaka

- Kemendikbud. 2016. "Kamus Online". *Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan* (online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengelolaan> (diakses pada 10 Oktober 2022. jam 18.15)
- Manullang, Manginar. 2012. *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Nugroho, Riant. 2012 . *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan..* Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor:2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2014. *Manajemen pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Syafiie, Inu Kencana dan Welasari. 2017. *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, Candra, dan Muhammad Rifa'i. 2016. *Dasar-dasar manajemen: mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif*. Medan: Perdana